

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 merupakan bagian dari proses demokrasi lokal yang tidak hanya melibatkan aktor politik formal, tetapi juga melibatkan peran organisasi kemasyarakatan, termasuk organisasi keagamaan. Dalam konteks ini, Muhammadiyah memiliki posisi strategis sebagai organisasi masyarakat Islam yang memiliki basis sosial yang luas serta otoritas moral di tengah masyarakat. Di Tasikmalaya, dinamika Pilkada 2024 berlangsung secara kompetitif dan diwarnai oleh berbagai upaya pendekatan politik dari para kandidat kepada kelompok masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan dan tokoh agama, sehingga menempatkan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Tasikmalaya pada posisi yang cukup kompleks dalam merespons dinamika politik lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik Muhammadiyah pada Pilkada 2024 di Kota Tasikmalaya, khususnya terkait dengan sikap dan peran Pimpinan Daerah Muhammadiyah dalam menghadapi kontestasi politik lokal.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan Teori Pilihan Rasional James S. Coleman dan Raymond Boudon untuk memahami pengambilan keputusan Muhammadiyah sebagai aktor kolektif dan individu dalam merespons dinamika Pilkada 2024. Selain itu, teori civil society Antonio Gramsci digunakan untuk melihat Muhammadiyah sebagai kekuatan masyarakat sipil yang menjaga independensi organisasi dan legitimasi moral di tengah dinamika politik lokal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kelembagaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya tetap berkomitmen pada prinsip netralitas sebagaimana diamanatkan dalam Khittah Muhammadiyah. Namun, dalam praktiknya terdapat keterlibatan sebagian pimpinan dalam politik praktis dengan memanfaatkan posisi dan legitimasi sebagai pimpinan organisasi untuk membangun kedekatan maupun memberikan dukungan kepada kandidat tertentu. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif organisasi dengan praktik politik yang terjadi di lingkungan organisasi. Dalam perspektif teori pilihan rasional, tindakan tersebut dapat dipahami sebagai pilihan rasional individu yang didasarkan pada pertimbangan kepentingan dan relasi politik. Meskipun demikian, Muhammadiyah seharusnya tetap menjaga independensi organisasi sebagai kekuatan moral dan kekuatan penyeimbang yang mengawal kehidupan politik secara objektif, bukan menjadi bagian dari politik praktis melalui pemanfaatan jabatan organisasi.

Kata kunci: Politik Muhammadiyah, Pilkada 2024, Teori Pilihan Rasional

ABSTRACT

The 2024 Regional Head Election (Pilkada) represents a dynamic process of local democracy that involves not only formal political actors but also civil society organizations, including Muhammadiyah as an Islamic organization with a broad social base and strong moral authority. In the context of Tasikmalaya City, the highly competitive political contestation and the intensive engagement of candidates with community groups have placed the Regional Leadership of Muhammadiyah (PDM) in a complex position between maintaining organizational neutrality and responding to evolving local political realities. Based on this research problem, this study aims to analyze the political dynamics of Muhammadiyah in the 2024 Pilkada in Tasikmalaya City, particularly focusing on the stance and role of the PDM in responding to local political contestation.

This study uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation studies. The analysis applies James S. Coleman and Raymond Boudon's Rational Choice Theory to understand Muhammadiyah's decision-making as both a collective and individual actor in responding to the dynamics of the 2024 regional election. In addition, Antonio Gramsci's civil society theory is used to examine Muhammadiyah as a civil society force that maintains organizational independence and moral legitimacy amid local political dynamics.

The findings indicate that, institutionally, the Regional Leadership of Muhammadiyah in Tasikmalaya City remains committed to the principle of political neutrality as mandated by the Khittah Muhammadiyah. However, in practice, some leaders have been involved in practical politics by using their positions and organizational legitimacy to build political relationships and express support for particular candidates. This situation reflects a gap between the organization's normative commitment and its actual political practices. From the perspective of Rational Choice Theory, such actions can be understood as rational individual choices based on considerations of personal interests and political relationships. Nevertheless, Muhammadiyah should uphold its organizational independence as a moral force and a balancing force that objectively oversees political life, rather than becoming directly involved in practical politics through the use of organizational positions.

Keywords: *Politik Muhammadiyah, Rational Choice Theory, Local Democracy*